

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PERCERAIAN DI BAWAH PASAL 47 DAN PASAL 48,
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM
(NEGERI SELANGOR) 2003
(Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

AHMAD AKASHAH BIN AHMAD AZNAN
NIM. 11820115294

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2022 M/1444 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di Bawah Seksyen 47 Dan Seksyen 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)**, yang ditulis Oleh:

Nama : Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan
 Nim : 11820115294
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, ²³ November 2022
 Pembimbing Skripsi

Haswir. M.Ag.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumutkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di Bawah Pasal 47 Dan Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan

NIM : 11820115294

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 5 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Penguji III

Dr. Hendri. K., M.Si

Penguji IV

Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan
 NIM : 11820115294
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Bharu Kelantan, 03 Agustus 1998
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Prodi : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN
 DI BAWAH SEKSYEN 47 DAN SEKSYEN 48, ENAKMEN UNDANG-UNDANG
 KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003, (Studi Kasus Jabatan Kelakiman
 Syariah Selangor).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, November 2022

Yang membuat pernyataan



Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan
NIM : 11820115294

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan: Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di bawah Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)

Pernikahan menurut Islam adalah suatu ibadah. Dengan melaksanakan ibadah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan kebahagiaan. Tujuan dari sebuah pernikahan itu adalah untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun ada juga hubungan pernikahan yang tidak dapat mencapai tujuan pernikahan itu karena adanya beberapa masalah dan berakhir dengan perceraian. Talak atau perceraian dibolehkan dalam Islam akibat adanya perselisihan atau adanya sesuatu yang bahaya jika pasangan terus bersama. Akan tetapi sebelum sampai kepada perceraian, hakim Pengadilan Agama akan mengutus seorang hakam bagi pihak suami dan seorang bagi pihak isteri dengan tujuan mendamaikan pasangan yang bermasalah.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengenai hakam, bagaimana efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Selangor dan bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap fungsi hakam dalam perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu: penulis mengadakan wawancara dengan 15 orang yaitu 4 orang pegawai yang merupakan staf di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dan 11 orang hakam yang merupakan staf hakam dari Majlis Agama Islam Selangor. Sumber Sekunder merupakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil analisis menunjukkan efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Selangor adalah kasus-kasus perceraian yang dapat diselesaikan oleh hakam ini mayoritasnya berakhir dengan perceraian dan sangat sedikit sekali kasus yang dapat diselesaikan dengan perdamaian. Pasal 47 dan 48 menjelaskan pasangan yang ingin bercerai harus melaporkan kepada Pengadilan Agama dan jika hakim mendapati pasangan masih bisa didamaikan, hakim akan mengutus hakam. Ulama' fiqh pula berbeda pendapat dalam menafsirkan fungsi hakam dalam menyelesaikan *syiqaq*, diantara mereka ada yang menafsirkan hakam sekadar wakil dan ada juga yang berpandangan hakam adalah hakim yang bisa menjatuhkan talak.

Kata Kunci: Efektivitas, Hakam, Perceraian



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS HAKAM DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERCERAIAN DI BAWAH PASAL 47 DAN PASAL 48, ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003, (STUDI KASUS JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR)”**. Kemudian, shalawat dan salam buat Nabi junjungan besar Muhammad saw. Yang telah menuntun umat manusia kearah yang di ridahi oleh Allah swt.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahawa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta Ahmad Aznan Bin Zakaria dan Ibunda tersayang Tuan Maizan Binti Tuan Mohamad yang istiqomah dalam memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan dengan ilmu agama kepada anak-anaknya. Serta sebagai pemberi motivasi, dorongan moral dan materil serta doa, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa juga kepada keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis mendoakan semoga Allah swt. Memberkati dan merahmati kehidupan mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Haswir, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah *subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, November 2022
Penulis

AHMAD AKASHAH BIN AHMAD AZNAN
NIM. 11820115294



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Talak	11
1. Pengertian Talak.....	11
2. Dasar Hukum Talak.....	12
3. Rukun dan Syarat Talak	17
B. Tinjauan Umum Tentang Hakam.....	19
1. Pengertian Hakam	19
2. Dasar Hukum Hakam	20
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Hakam	22
4. Fungsi Dan Peran Hakam.....	24
5. Pengertian <i>Syiqaq</i>	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 47 dan Pasal 48.....	27
1. Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003	27
2. Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003	30
D. Penelitian Terdahulu	31

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Populasi dan Sampel	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Teknik Penulisan.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Sejarah Negeri Selangor Dan Jabatan Kehakiman Syariah Selangor	34
1. Sejarah Negeri Selangor	34
2. Sejarah Jabatan Kehakiman Negeri Selangor.....	36
B. Hasil Penelitian	40
1. Praktek Pasal 47 dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, mengenai hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS).....	40
2. Efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama, Selangor.....	64
3. Pandangan Fiqh Munakahat terhadap fungsi hakam dalam perceraian .	68
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah atau suruhan agama, setiap perintah agama adalah dihitung sebagai ibadah kepada Allah apabila kita melakukannya. Setiap yang diperintahkan Allah itu mempunyai tujuan yang mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari pernikahan adalah menjadikan keluarga yang bahagia.¹ Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²

Bagi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, pasangan suami isteri harus saling menghormati, mempunyai rasa cinta, dan tahu akan tanggungjawab masing-masing. Namun ada juga hubungan perkawinan yang tidak mencapai tujuan pernikahan itu karena mempunyai beberapa masalah seperti pasangan suami isteri masing-masing gagal untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka. Apabila timbulnya perselisihan antara suami isteri, maka akan terjadinya kasus perceraian.

Perceraian atau talak adalah perkara yang paling tidak diinginkan bagi mana-mana pihak suami atau isteri yang sudah bernikah serta sudah menjalin kasih sayang, apalagi kalau pasangan suami isteri tersebut sudah mempunyai anak. Perceraian akan memberi dampak negatif untuk kehidupan anak-anak setelah pasangan bercerai. Walaupun begitu, perceraian adalah jalan terbaik

¹ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Hlm. 17

² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekiranya kedua-dua pasangan sudah tidak bisa lagi hidup bersama dan ingin membubarkan pernikahan mereka secara sah menurut hukum Islam.

Di dalam hukum Islam, perceraian atau talak pada prinsipnya adalah diperbolehkan namun perkara ini dibenci oleh Allah SWT. Perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh ditempuh oleh pasangan suami isteri jika rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan dan tidak ada lagi jalan keluar bagi permasalahan rumah tangga tersebut. Islam telah mengajar kepada kita agar sebelum mengambil keputusan terjadinya perceraian, pasangan suami isteri harus menempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan pernikahan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.³ Perceraian dibenci oleh Allah dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahawasanya Nabi SAW bersabda, “Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak”.*(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)⁴

Menurut kesepakatan para ulama, suami yang sempurna dan sehat akalnya, baligh, diperbolehkan menjatuhkan talak, baik dengan ucapan perkataan lafaz talak maupun menggunakan tulisan yang ingin ditujukan kepada isterinya, dengan isyarat (bagi seorang tuna wicara) atau dengan menggunakan seorang wakil. Talaknya dinyatakan sah.

³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqah Sunnah Wanita Muslimah, Cet 4* (Selangor: Berlian Publications, 2013) Hlm. 463.

⁴ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Cet 2*, (Qaahrah, Mesir : Darul Uthman Littarath, 2013), Hlm. 505.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Talak tidak akan jatuh tanpa mengucapkan lafaz talak, baik secara tegas ataupun tulisan, kecuali pada dua tempat:⁵

1. Cerai orang yang tidak bisa bicara, seperti orang bisu. Apabila dia menceraikan istrinya dengan isyarat, maka telah jatuh talaknya.
2. Apabila suami menulis kalimat berupa talak dan mempunyai niat mentalak, maka talaknya dinyatakan sah menurut imam yang empat, kecuali satu pendapat sebagian sahabat Syafi’I bahwa talaknya tidak sah.

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahinya.

Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahinya (suami).

Dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S al-Ahzab : 49)*⁶

Seperti yang telah dijelaskan di atas, hak talak adalah hak mutlak suami. Terdapat tiga jenis talak yang biasa diketahui umum yaitu talak *shorih*,

⁵ Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalok Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Hlm. 128

⁶ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani). Hlm. 424.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak *kinayah* dan talak *taklik*. Namun begitu, isteri juga bisa menuntut perceraian daripada suami yaitu secara kaedah tebus talak (*khuluk*).

Talak juga dibolehkan akibat adanya perselisihan atau adanya kemudharatan. Dalam hal ini, si isteri akan mengadukan hal ini kepada hakim (qadhi). jika si isteri melakukan aduan berulang kali, maka hakim (qadhi) akan mengutus dua orang hakam, seorang dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami untuk mendamaikan pasangan suami isteri ini.⁷

Hakam dikenali sebagai arbitrase atau juru damai dan bisa diartikan sebagai orang yang diberi kuasa menjatuhkan sesuatu hukuman kepada seseorang yang telah ditetapkan oleh Hakim di Pengadilan Agama. Manakala dari sudut istilah yaitu suatu proses dimana para pihak yang bersengketa menunjuk seseorang atau seorang hakam dengan tujuan menyelesaikan sengketa yang telah timbul diantara paa pihak berdasarkan hukum syarak.⁸

Al-Syiqaq dari sudut terminologi bisa diartikan dengan perkelahian diantara suami dan isteri yang berlarutan sehingga merusak kerukunan rumah tangga. Perkelahian disini adalah perkelahian yang kerap antara suami dan isteri itu sama ada karena nusyuz isteri, kezaliman suami, ketidakpastian siapa yang benar antara kedua-duanya, atau salah satu pihak atau kedua-dua pihak berdusta.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm. 457.

⁸ Jabatan Keakiman Syariah Selangor “ *Pengenalan Mengenai Hakam*” <https://www.jakess.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan/perkhidmatan-utama/hakam>

Keberadaan Hakam dalam Peradilan Agama telah disyariatkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur`an surah al-Nisa` ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui. (Q.S al-Nisa' : 35)*⁹

Mahkamah syariah di Malaysia adalah sebuah institusi kehakiman yang membicarakan serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan jenayah syariah mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.¹⁰

Bidang kuasa Mahkamah Syariah di Malaysia adalah sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Malaysia. Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan pada 1988 memberi Mahkamah Syariah bidang kuasa berasingan daripada mahkamah sivil, menjadikan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan mahkamah biasa dan dianggap setaraf.¹¹ Kuasa Mahkamah Syariah adalah di bawah enakman negeri.

⁹ Departmen Agama RI, *Op.Cit.* Hal. 84

¹⁰ Wikipedia, "Mahkamah Syariah Di Malaysia" https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia

¹¹ Pakdi, "Penjelasan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan" <https://www.malaysiakini.com/letters/45948>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awalnya, tugas hakam di Peradilan Agama (Mahkamah Syariah) adalah sebagai pendamai di antara suami isteri, namun jika usaha untuk mendamaikan pasangan tidak berhasil, ada pendapat yang mengatakan hakam berhak memisahkan dan ada juga pendapat yang mengatakan hakam tidak berhak memisahkan seperti pendapat Imam Syafi`I dan Imam Ahmad. Menurut mereka hakam hanyalah wakil dan tidak berhak memisahkan pasangan suami isteri kecuali dengan kerelaan hati mereka. Namun menurut Imam Malik, hakam bukan sekadar wakil, tetapi sebagai qadhi dari penguasa (Hakim) yang berhak memisahkan.

Hakam telah diperuntukkan secara jelas di bawah Pasal 47 dan Pasal 48 di bawah Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Kaedah-kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014.¹² Hakam juga terdiri daripada kalangan saudara-mara terdekat yaitu dua juru damai (Hakam) yang mempunyai makluman berkaitan isu rumah tangga pihak-pihak untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri tersebut. Pelantikan hakam dibuat setelah mahkamah mengetahui bahwa perkelahian (*syiqaq*) selalu terjadi antara pihak-pihak dalam waktu perkawinan tersebut selepas selesai urusan perdamaian di peringkat Jawatankuasa Pendamai gagal atau menemui jalan buntu.

Dalam Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Ayat (5) menjelaskan “Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada

¹² Seksyen 47 & Seksyen 48, *Perceraian dengan talak atau dengan perintah & Timbangtara Oleh Hakam*, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Selangor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujuk kes itu kepada jawatankuasa itu.”¹³

Setelah kasus dirujuk kepada Jawatankuasa Pendamai dan para pihak berjaya didamaikan, maka Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) akan menghapus kasus tersebut. Namun, jika jawatankuasa pendamai gagal mendamaikan para pihak, mahkamah akan meneruskan kasus ke Pasal 48. Hal ini berdasarkan Ayat (14) Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 “Jika jawatankuasa mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah, dan jika Mahkamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan Mahkamah untuk melafazkan satu talaq atau jika suami itu enggan melafazkan satu talaq, maka Mahkamah hendaklah merujuk kes itu kepada Hakam untuk tindakan menurut Pasal 48.”¹⁴

Dalam Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Ayat (1) menjelaskan “Jika Mahkamah berpuas hati bahawa

¹³ Pemerintah Malaysia. Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Tentang Perceraian Dengan Talak Atau Dengan Perintah. Sekretiat Negara. Selangor

¹⁴ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkelahian (*syiqaq*) sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh melantik, mengikut Hukum Syarak, dua orang juru damai (penimbangtara) atau Hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing.”¹⁵

Di dalam Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) Selangor telah ditetapkan bahwa keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakam tidak boleh dimohon atau dilakukan peninjauan kembali, ia bersifat muktamad dan mengikat pihak-pihak yang bertikai. Namun, jika terdapat kecacatan dari sudut prosedur sahaja, pihak-pihak boleh memeriksa pada tahap mana ia dirasakan perlu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam al-Qur’an menyatakan bahawa hakam-hakam dilantik adalah untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang bertikai. Para fuqaha juga saling berselisih pendapat tentang pemisahan kedua orang hakam terhadap pasangan suami isteri yang bertikai akibat terjadinya perselisihan dalam rumahtangga mereka.¹⁶ Namun, di Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) Selangor, hakam-hakam diberi kuasa penuh yakni bisa memutuskan ikatan pernikahan suami isteri yang bertikai dengan lafaz *talaq* atau dengan kaedah *khulu’* apabila dirasakan perlu.

Dari penulisan latar belakang masalah ini, dapat dilihat bahwa hakam di dalam Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah) di Selangor adalah sebagai juru damai dan juga bisa menjatuhkan talak. Maka dengan demikian

¹⁵ Pemerintah Malaysia. Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Tentang Timbangtara Oleh Hakam. Sekretiat Negara. Selangor

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hlm. 457.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti berkeinginan untuk menyusun penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang hakam di Mahkamah Syariah negeri Selangor dengan judul **“Efektivitas Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di Bawah Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor).”**

B. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka dalam pembahasan penelitian ini dibatasi hanya dengan Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengenai hakam di Mahkamah Syariah Selangor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengenai hakam?
2. Bagaimana efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Mahkamah Syariah Selangor?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap fungsi hakam dalam perceraian?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan praktek Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengenai hakam.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Mahkamah Syariah Selangor.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Munakahat terhadap fungsi hakam dalam perceraian.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu Islam khususnya tentang hakam dalam menyelesaikan masalah perceraian
 - b. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan keinsinyuran untuk pengembangan jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
 - c. Penulisan penelitian ini juga diharap akan memperluas wawasan intelektualitas kepada umat Islam di bidang hukum terutamanya tentang kasus tinjauan umat Islam dan undang-undang terhadap praktek hakam di Mahkamah Syariah Negeri Selangor.
 - d. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.

E. Sistematika Penulisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Agar penulisan ini tersusun secara sistematis, maka penulis akan menyusun laporan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tunjauan pustaka, tinjauan penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II penulis akan membahas tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai talak dan hakam yang meliputi pengertian talak, rukun-rukun talak, dan dasar hukum talak. Adapun mengenai hakam, peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian hakam, dasar hukum hakam, syarat pengangkatan hakam dan mengenai perkelahian diantara suami istri yakni *syiqaq*.

BAB III penulis akan membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan teknik penulisan.

Bab IV penulis akan membahas mengenai bagaimana praktek Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor tentang perceraian dan pendamaian pihak suami istri yang berkelahi melalui hakam, efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Mahkamah Syariah Selangor dan pandangan fiqh munakahat terhadap fungsi hakam.

BAB V Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Menurut Pasal 2 kompilasi hukum Islam di Indonesia, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *mubah* (boleh). Hukum *mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, dapat sunnah dapat makruh, dapat *mubah* dan dapat juga haram. Dalam kaidah fiqih ada menjelaskan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.¹⁸

Akar kata *thalaq* (talak) adalah *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata, *أطلقت الأسير* aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan

¹⁷ Hj. Wati Rahmi Ria, SH. MH., *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018), hal. 95

¹⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) Cet 1*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 60

membebaskannya.¹⁹ Dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah disebutkan juga, arti *thalaq* secara bahasa adalah 'mengangkat ikatan' baik mengangkat ikatan itu untuk makna hakiki ataupun maknawi. Seperti jika seseorang mengatakan: "Aku telah melepaskan unta dari ikatannya." Dan juga seperti mengatakan: "Aku telah membebaskanmu untuk membelanjakan (harta)."²⁰ Dalam syariat Islam, *talaq* artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Menurut istilah pula, talak adalah sebagai berikut:

Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy menjelaskan dalam kitabnya, talak secara istilah adalah melepaskan akad pernikahan dengan lafazh yang tertentu dan semisalnya.²¹

Menurut syari'at, arti talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafazh talak dan yang sejenis dengannya. Atau memutuskan ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafazh yang dkkhususkan. Terputusnya ikatan perkawinan secara langsung dalam bentuk perceraian *Ba'in*. Ditangguhkan berarti setelah berakhir periode *'iddah*, yang berbentuk talak *Raj'i*.²²

2. Dasar Hukum Talak

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hal. 2

²⁰ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta :Pustaka As-Sunnah, 2009) Hal. 225.

²¹ *Ibid*, Hal. 225

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal. 318.

Al-Quran dan al-Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam.

Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk membimbing kehidupan manusia di semua tingkatan termasuk kekeluargaan. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukum atas semua perilaku umat Islam, dalam ibadah, perbuatan sehari-hari, ekonomi, politik dan termasuk juga hukum nikah dan talak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَهَّ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S al-Baqarah : 232)²³

Mengenai hukum talak pula, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama' fikih. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak, kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari'at).²⁴

Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyuruh untuk berkawin. Namun, bagi perceraian (talak) memang tidak terdapat ayat

²³ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani). hlm. 37

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing , 2008), hal. 4.

untuk menyuruh atau melarang berlakunya talak. Yang terdapat dalam al-Qur'an hanyalah sekadar mengatur kapan talak mesti terjadi. Jika suami ingin menceraikan istrinya, wanita itu harus berada dalam keadaan siap memasuki masa 'iddah, seperti dalam firman Allah Swt dalam Surat al-Thalaq (65) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (Q.S al-Thalaq : 1)*²⁵

Walaupun hukum asal talak itu adalah *mubah* karena dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang. Namun, talak adalah perbuatan yang tidak disenangi Rasulullah Saw, dan ini bermaksud hukum talak itu adalah makruh. Ini berdasarkan hadits Nabi SAW dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw bersabda:

²⁵ Departmen Agama RI, *Op.cit.* Hlm. 558

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw bersabda, “perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa hukum talak itu adalah halal namun perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Swt dan selayaknya tidak dilakukan. Talak adalah jalan penyelesaian terakhir bagi hubungan pernikahan yang mempunyai masalah yang tidak ada jalan keluar untuk pendamaianya. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hukumnya akan berbeda sesuai dengan keadaan, oleh karena itu maka hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Wajib.

Diantara cerai yang wajib adalah orang yang melakukan sumpah *ila'*, apabila telah berlalu masanya empat bulan, berdasarkan firman

Allah Swt:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٨﴾

Artinya: *Orang yang meng-ila' (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika mereka berketetapan hati untuk*

²⁶ Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar jilid 3*, Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz (Pustaka Azzam, 2011) Hal. 554

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S al-Baqarah : 226-227)²⁷

Ibnu Taimiyyah juga ada mengatakan “wajib bagi suami untuk memerintahkan istrinya untuk shalat, maka apabila istri tidak mau shalat, wajib baginya untuk menceraikannya sesuai dengan pendapat yang paling benar”²⁸

2. Sunnah

Thalag disunnahkan apabila suami dan istri sudah tidak lagi merasa nyaman apabila bersama, maka apabila suami menceraikan istrinya, *thalag* itu merupakan kebaikan bagi sang suami dan istri. Jika keduanya masih saling mencintai, maka yang lebih utama adalah bagaimana mereka berusaha untuk menghilangkan *madharat* yang mengakibatkan sang istri merasa tidak nyaman.²⁹

Thalag juga bisa menjadi sunnah jika si istri lalai untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib seperti shalat dan lain-lain.

3. Mubah

Thalag bisa jadi *mubah* dengan kata lain, ketika ada alasan perceraian karena akhlak istrinya yang buruk atau perlakuannya yang buruk, dan si suami itu merasa tidak nyaman dengan wanita itu dan tidak mampu memperbaikinya lagi.

4. Makruh

²⁷ Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani). Hlm. 36

²⁸ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta :Pustaka As-Sunnah, 2009) Hal. 229.

²⁹ *Ibid*, Hlm. 230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makruh hukumnya menceraikan istri jika tidak ada kebutuhan atau sebab yang kukuh. Dalam Islam telah jelas bahwa dibenci talak yang tidak dibutuhkan. Berikut hadits yang menjelaskannya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ : أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Saw bersabda, “perkara halal yang paling dibenci Allah ‘Azza wa Jalla adalah talak.”*

(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)³⁰

5. Haram

Haram menceraikan istri dalam keadaan dia sedang haid atau jika sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan ia telah menggaulinya. *Thalaq* ini disebut dengan *Thalaq Bid’i*.³¹ Hal ini berdasarkan hadits nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللَّهُ) أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِنَبِيِّ، فَقَالَ: مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ)

Artinya: *Dari Ibnu Umar Ra, bahwasanya ia menceraikan istrinya ketika sedang haid. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Saw, maka beliau pun bersabda, “Suruhlah ia agar merujuknya, kemudian ia menceraikan ketika telah suci atau dalam keadan hamil”.* (HR. Jam’ah kecuali Al Bukhari)³²

3. Rukun dan Syarat Talak

³⁰ Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar jilid 3*, Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz (Pustaka Azzam, 2011) Hal. 554

³¹ Syaikh Abdul Abu Abdurrahman bin Yusuf Al-Azazy, *Tamammul Minnah Shahuh Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta :Pustaka As-Sunnah, 2009) Hal. 231.

³² Iman Asy-Syaukani, *Op. Cit*, Hal. 556

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun talak menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Sang suami yang melafazkan talak
2. Sang istri yang di talak
3. *Sighat* yaitu lafal yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun kiasan.³³
4. Ada niat untuk menjatuhkan talak.

Menurut jumhur ulama', talak tidak akan wujud melainkan dengan adanya suami yang melafazkan talak kepada istrinya yaitu *sighat* dan si suami memang benar-benar mempunyai niat untuk menceraikan istrinya.

Adapun syarat sah menjatuhkan talak adalah sebagai berikut:

1. Talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau wakilnya, yang cukup umur, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Talak yang dijatuhkan oleh orang gila adalah tidak sah, Gila disini berarti kehilangan kesadaran akal karena sakit. Adapun orang yang sihat akalnya akan tetapi hilang akalnya dengan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dan dinyatakan berdosa, maka talaknya dinyatakan berlaku sebagai tindakan hukum.³⁴
2. Mempunyai kehendak untuk menjatuhkan talak. Menurut kenyataan ini, orang tersebut dengan sengaja mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai dengan artinya tanpa adanya niat terlebih dahulu. Dengan demikian, talak tidak perlu ada niat selama itu disengaja dengan lafaz

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing , 2008), hal. 581

³⁴ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) Hal. 583

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sharih (jelas dan tegas). Namun, jika orang yang menyebutkan lafaz talak kepada istrinya dan dimaksudkan untuk menyanyi, atau mengajar, tidak jatuh talak.³⁵

3. Talak adalah untuk wanita yang bergelar istri yang sah. Orang yang melafazkan talak pada wanita yang belum dinikahinya, talaknya dinyatakan tidak sah. Walaupun pada akhirnya dia menikahi wanita itu. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya: *Dari Al Miswar bin Makhramah, bahwasanya Nabi Saw bersabda, "Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki. " (HR. Ibnu Majah)³⁶*

4. Mempunyai hubungan pernikahan yang sah antara suami dan isteri tersebut.
5. Lafaz talak harus mengandung makna pelepasan ikatan nikah, baik secara *sharih* (jelas dan tegas), yakni talak, *firaq*, dan *al-Sarh*, maupun *kinayah* (sindiran). Lafaz yang *sharih* tidak perlu niat, sementara lafaz sindiran harus disertai niat untuk menjatuhkan talak.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hakam

1. Pengertian Hakam

³⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019) Hal. 133

³⁶ Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar jilid 3*, Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz (Pustaka Azzam, 2011) Hal. 576

³⁷ Iffah Muzammil, *Op.Cit.* Hal. 133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakam menurut bahasa adalah seseorang yang dibebani hukum keatasnya di antara manusia. Kata hakam berasal dari bahasa Arab *al-Hakamu* yang berarti wasit atau juru damai.

Hakam menurut bahasa berarti memimpin, sedangkan menurut istilah, hakam adalah pihak yang berasal dari keluarga suami isteri atau pihak lain yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persengketaan. Para mujtahid sepakat bahawa menunjuk dua orang hakam apabila terjadi persengketaan antara suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.³⁸

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Negara Republik Indonesia tentang Peradilan Agama pula menyebutkan bahwa: “Hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan *syiqaq*”.

Sebagaimana ditafsirkan dalam Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014, hakam artinya seseorang penimbang tara (arbiter) yang diberi kuasa oleh pihak-pihak atau oleh Mahkamah untuk menyelesaikan perkelahian (*syiqaq*) antara suami dan isteri”.³⁹

2. Dasar Hukum Hakam

Seperti yang kita ketahui, Hakam (Juru Damai) adalah sebuah proses perdamaian yang ditengahi oleh pihak ketiga yang netral dan tidak

³⁸ Muhamad al-Fattah, *Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Usrah, Vol. 1 Nom. 1, Juni 2018, Hal. 40.

³⁹ Warta Kerajaan, *Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014*, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Jil. 67 No. 10, Mei 2014, Hal. 96.

memihak kepada siapapun. Berikut adalah firman Allah Swt yang menjadi dasar hukum bagi hakam (juru damai):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al-Nisa’: 35)⁴⁰

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka didamaikan oleh hakam sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zalim dari keduanya dari perbuatan zalim.

Mazhab Hanafi, Syafi’I, dan Hambali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapa pun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari isteri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada *qadhi*. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si isteri.⁴¹

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

⁴⁰ Departmen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani). Hlm. 84

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) Hal. 457.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka, Allah akan menyusahkannya.” (HR. Imam Malik)

Tugas hakam adalah untuk mendamaikan pihak suami isteri yang sedang mengalami perselisihan. Maka, usaha mendamaikan pihak suami isteri yang mengalami perselisihan ini adalah perbuatan seorang muslim yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Artinya: Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar.⁴² (QS. al-Nisa' : 114)

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Hakam

Dalam kasus perselisihan dalam rumahtangga antara suami isteri, mahkamah telah menetapkan bahawa hakam adalah orang yang akan mencari tahu penyebab permasalahan dan berusaha mendamaikan

⁴² Departmen Agama RI, *Op.Cit.* Hal. 97

pasangan tersebut bagi mengelak berlakunya perceraian. Jadi, orang yang akan diangkat menjadi hakam perlu memenuhi beberapa syarat.

Menurut Sayyid Sabiq di dalam kitabnya menjelaskan, kedua orang hakam (mediator) ini disyaratkan terdiri dari dua orang laki-laki, berakal sehat, dewasa, adil dan beragama Islam. Keduanya tidak mesti berasal dari keluarga pasangan suami istri yang sedang bertengkar.⁴³

Menurut undang-undang keluarga Islam negeri Selangor pula, dalam Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014 ada menjelaskan tentang syarat pelantikan hakam pada bahagian II Ayat (subkaedah) 8 (1) dan (3):

Ayat (Subkaedah) 8 (1) Tertakluk kepada Ayat (subkaedah) (2), mana-mana saudara karib suami dan isteri layak dilantik sebagai Hakam jika dia:⁴⁴

1. Beragama Islam;
2. Lelaki;
3. Berakal dan baligh (mukalaf);
4. Adil dan amanah; dan
5. Mempunyai pengetahuan asas dalam hal kekeluargaan dan Hukum Syarak.

Manakala Ayat (Subkaedah) 8 (3) Seseorang yang hendak dilantik dan didaftarkan sebagai anggota Panel Hakam hendaklah:⁴⁵

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing , 2008), hal. 96

⁴⁴ Warta Kerajaan, *Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014*, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Jil. 67 No. 10, Mei 2014, Hal. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Beragama Islam;
2. Warganegara Malaysia;
3. Lelaki;
4. Berakal dan Baligh (Mukalaf);
5. Adil dan amanah;
6. Berkelakuan baik dan tidak pernah disabitkan atas apa-apa kesalahan jenayah sama ada di Malaysia atau di mana-mana tempat lain;
7. Kompeten dalam hal-hal kekeluargaan dan hukum Syarak;
8. Tidak pernah dibatalkan pelantikannya di bawah kaedah 29;
9. Bukan seorang bankrap ;
10. Memiliki kelulusan akademik sekurang-kurangnya di peringkat sijil *Thanawi* atau yang setaraf dengannya atau yang lebih tinggi daripada mana-mana institusi pendidikan atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dalam bidang pengajian Islam; dan
11. Lulus dalam apa-apa proses penilaian yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.

4. Fungsi Dan Peran Hakam

Fungsi keberadaan hakam seperti yang kita ketahui adalah sebagai wasit atau juru damai dan tujuannya hanya berusaha untuk mendamaikan suami istri yang mengalami perselisihan dan hakam tidak berhak untuk

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 100.

memutuskan ikatan pernikahan. Yang bisa membuat keputusan untuk memutuskan suatu ikatan pernikahan itu hanyalah hakim.

Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali menjelaskan dalam kitabnya, hakam bertugas untuk menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali suami istri agar kembali hidup bersama sebaik-baiknya, jika jalan perdamaian itu tidak berhasil, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.⁴⁶

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berbeda pendapat dalam merumuskan tugas hakam ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakam hanyalah sekadar menelusuri penyebab terjadinya perselisihan dan berusaha untuk mendamaikan pihak suami istri itu, adapun jika usaha mendamaikan itu tidak berhasil, hakam tidak mempunyai wewenang untuk menceraikan pasangan suami isteri itu.⁴⁷

Menurut mazhab Maliki pula, setelah menelusuri punca terjadinya perselisihan maka hakam berhak untuk memutuskan bahwa apakah suami isteri itu harus berdamai ataupun bercerai.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hal. 242-243.

⁴⁷ Muhamad al-Fattah, *Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Usrah, Vol. 1 Nom. 1, Juni 2018, Hal. 42.

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 42-43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakam yang telah dilantik di Mahkamah Syariah di Malaysia tidak berkuasa untuk menceraikan suami istri yang berkelahian (*syiqaq*) melainkan telah mendapat kuasa daripada mahkamah.⁴⁹ Hal ini berdasarkan kuasa yang diberikan oleh mahkamah. Jika mahkamah memberi kuasa mendamai, maka hakam tidak berkuasa untuk menceraikan pasangan tersebut. Namun, jika hakam diberi kuasa untuk menceraikan pasangan tersebut dan hakam tidak menjalankan tugasnya, maka hakam tersebut akan dipecat dan digantikan dengan hakam yang lain.

Menurut undang-undang keluarga Islam negeri Selangor pula, dalam Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014 ada menjelaskan tentang fungsi hakam pada bahagian III subkaedah 9 “Hakam hendaklah menamatkan *syiqaq* antara suami dan istri dengan cara mendamaikan atau memisahkan kedua-duanya dengan talak atau khuluk”.⁵⁰

5. Pengertian *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri itu.⁵¹ *Syiqaq* juga dapat diartikan dengan perselisihan yang

⁴⁹ Nur Zulfah, Mazarina Nasuha, *Penglibatan Jawatankuasa Pendamai dan Hakam Dalam Penyelesaian Tuntutan Perceraian*, UITM Press, November 2021, Hal. 220.

⁵⁰ Warta Kerajaan, *Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014*, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Jil. 67 No. 10, Mei 2014, Hal. 100

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 194.

terjadi antara pasangan suami istri yang dikarenakan oleh *nusyuznya* istri atau suami berlaku kejam terhadap istrinya.

Syiqaq menurut Jabatan Kehakiman Syariah Selangor adalah perkelahian antara suami istri yang berlarutan sehingga menjejaskan kerukunan rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 47 dan Pasal 48

1. Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah tentang perceraian dengan talaq atau dengan perintah. Berikut adalah penjelasannya:⁵²

- 1) Seorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam borang yang ditetapkan, disertai dengan suatu akuan berkanun yang mengandungi:
 - a) butir-butir mengenai perkahwinan itu dan nama, umur dan jantina anak-anak, jika ada, hasil dari perkahwinan itu;
 - b) butir-butir mengenai fakta-fakta yang memberi bidang kuasa kepada Mahkamah di bawah pasal 45;
 - c) butir-butir mengenai apa-apa prosiding yang dahulu mengenai hal ehwal suami isteri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat prosiding itu;
 - d) suatu pernyataan tentang sebab-sebab hendak bercerai;
 - e) suatu pernyataan tentang sama ada apa-apa, dan, jika ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian;
 - f) syarat apa-apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, peruntukan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada, atau,

⁵² Pemerintah Malaysia. Pasal 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Tentang Perceraian Dengan Talak Atau Dengan Perintah. Sekretiat Negara. Selangor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- jika tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai, cadangan pemohon mengenai hal-hal itu; dan
- g) butir-butir mengenai perintah yang diminta.
 - 2) Selepas menerima sesuatu permohonan untuk perceraian, Mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak yang satu lagi itu bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan Mahkamah untuk membolehkan Mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu.
 - 3) Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu dan Mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah pecah belah dengan tak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah.
 - 4) Mahkamah hendaklah merekodkan hal satu talaq itu, dan hendaklah menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
 - 5) Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju terhadap perceraian itu atau jika Mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, Mahkamah hendaklah dengan seberapa segera yang boleh melantik suatu jawatankuasa pendamai terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lain, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi isteri, dan merujuk kes itu kepada jawatankuasa itu.
 - 6) Pada melantik dua orang itu di bawah subseksyen (5), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
 - 7) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada jawatankuasa pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu.
 - 8) Jika jawatankuasa itu tidak dapat bersetuju atau jika Mahkamah tidak berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah boleh memecat jawatankuasa itu dan melantik jawatankuasa lain bagi menggantikannya.
 - 9) Jawatankuasa itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tarikh ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang dibenarkan oleh Mahkamah.
 - 10) Jawatankuasa itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi tiap-tiap seorang dari mereka peluang untuk didengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain dan membuat apa-apa penyiasatan yang difikirkannya patut dan boleh, jika ia fikirkan perlu, menanggung prosidingnya dari semasa ke semasa.
 - 11) Jika jawatan kuasa pendamai itu tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami isteri, jawatankuasa itu hendaklah mengeluarkan suatu perakuan tentang hal yang demikian itu dan boleh melampirkan pada perakuan itu apa-apa syor yang difikirkannya patut berkenaan dengan nafkah dan penjagaan anak-anak belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada, berkenaan dengan pembahagian harta, dan berkenaan dengan hal-hal lain berhubung dengan perkahwinan itu.

- 12) Tiada seseorang Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam sesuatu prosiding di hadapan sesuatu jawatankuasa pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh sesiapa jua, selain dari seorang ahli keluarganya yang karib, tanpa kebenaran jawatankuasa pendamai itu.
- 13) Jika jawatankuasa itu melaporkan kepada Mahkamah bahawa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu telah hidup semula bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menolak permohonan untuk perceraian itu.
- 14) Jika jawatankuasa mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan bahawa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu supaya hidup semula bersama sebagai suami isteri, Mahkamah hendaklah menasihatkan suami yang berkenaan itu melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah, dan jika Mahkamah tidak dapat mendapatkan suami itu hadir di hadapan Mahkamah untuk melafazkan satu talaq atau jika suami itu enggan melafazkan satu talaq, maka Mahkamah hendaklah merujuk kasus itu kepada Hakam untuk tindakan menurut Pasal 48.
- 15) Kehendak subseksyen (5) tentang rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak terpakai dalam sesuatu kasus:
 - a) di mana pemohon mengatakan bahawa dia telah ditinggal langsung oleh pihak yang satu lagi itu dan tidak tahu di mana pihak yang satu lagi itu berada;
 - b) di mana pihak yang satu lagi itu bermastautin di luar Malaysia Barat dan ia tidak mungkin masuk ke dalam bidang kuasa Mahkamah yang berkenaan itu dalam masa enam bulan selepas tarikh permohonan itu;
 - c) di mana pihak yang satu lagi itu sedang dipenjara selama tempoh tiga tahun atau lebih;
 - d) di mana pemohon mengatakan bahawa pihak yang satu lagi itu sedang mengidap penyakit otak yang tak boleh sembuh; atau
 - e) di mana Mahkamah berpuas hati bahawa ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan rujukan kepada suatu jawatankuasa pendamai tidak praktik.
- 16) Sesuatu *talaq raj'i* yang dilafazkan oleh suami melainkan dibatalkan terlebih dahulu, sama ada secara nyata atau tafsiran, atau dengan perintah daripada Mahkamah, tidak boleh berkuatkuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga habisnya tempoh 'iddah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17) Jika isteri hamil pada masa talaq itu dilafazkan atau pada masa perintah itu dibuat, talaq atau perintah itu tidak boleh berkuat kuasa untuk membubarkan perkahwinan itu sehingga berakhir kehamilan itu.

2. Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 adalah tentang timbangtara oleh hakam. Berikut adalah penjelasannya:⁵³

- 1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian (*syiqaq*) sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh melantik, mengikut Hukum Syarak, dua orang penimbangtara atau Hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing.
- 2) Pada melantik Hakam di bawah subseksyen (1) Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak yang berkenaan itu yang tahu akan hal keadaan kes itu.
- 3) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada Hakam tentang hal menjalankan penimbangtaraan dan mereka hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu dan Hukum Syarak.
- 4) Jika Hakam tidak dapat bersetuju, atau jika Mahkamah tidak puas hati dengan cara mereka menjalankan penimbangtaraan itu, Mahkamah boleh memecat mereka dan melantik Hakam lain bagi menggantikan mereka.
- 5) Hakam hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka masing-masing dan boleh, jika kuasa mereka membenarkan, melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah jika dibenarkan sedemikian oleh Mahkamah, dan jika demikian halnya, Mahkamah hendaklah merekodkan lafaz satu talaq itu, dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- 6) Jika Hakam berpendapat bahawa pihak-pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat memerintahkan perceraian oleh kerana sesuatu sebab, Mahkamah hendaklah melantik Hakam lain dan hendaklah memberi kepada mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian dan hendaklah, jika mereka berbuat demikian, merekodkan perintah itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

⁵³ Pemerintah Malaysia. Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 Tentang Timbangtara Oleh Hakam. Sekretiat Negara. Selangor

- 7) Melainkan jika dia adalah anggota keluarga terdekat pihak itu, maka tiada seorang pun atau Peguam Syarie boleh dibenarkan hadir atau mewakili mana-mana pihak di hadapan Hakam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti buat mencari perbandingan dan selanjutnya buat menemukan ilham baru bagi penelitian ini.

Bagi menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini, maka pada kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Ahmad Afandi (2020)

Penelitian Ahmad Afandi (2020) berjudul “*Konsep Nusyuz dan Hakam Menurut Imam Syafi’I*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode “*Deskriptif Komparatif*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep nusyuz dan hakam menurut Imam Syafi’i.

Sesuai dengan penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa, penelitian ini lebih memfokuskan pada nusyuz. Nusyuz tidak hanya datang dari istri tetapi juga bisa datang dari suami. Dalam penelitian ini juga menjelaskan menurut Imam Syafi’I, hakam berwenang untuk mendamaikan dan tidak berwenang untuk menceraikan pasangan suami istri yang bersengketa.

2. Hasil penelitian Fauzan Nento dan Titin Samsudin (2018)

Penelitian Fauzan dan Titin berjudul “*Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode “*deskriptif kualitatif*”. Penelitian ini bertujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk membahas persepsi hakim di pengadilan Agama Gorontalo tentang perkara syiqaq.

Sesuai dengan penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa, apabila pasangan suami isteri yang bersengketa ingin bercerai, harus didamaikan oleh hakamaian telah diubah dengan hakim mediator tunggal saja dan apabila para pihak menginginkan perkaranya masuk ke dalam kasus syiqaq maka haruslah dari awal pendaftaran gugatannya kemudian proses jalannya sidang berikutnya untuk hakamain ini statusnya hanya bukan sebagai saksi melainkan hanya didengarkan keterangan atas usahanya mendamaikan pihak tersebut, sebab hakamain dari pihak tersebut harus mendapat persetujuan dari majelis hakim pengadilan. Setelah mendengarkan keterangan dari hakamain kemudian Majelis Hakim meminta dua orang saksi dari pihak berperkara tersebut untuk memperkuat gugatannya.

3. Hasil penelitian Pahrizal Nasution (2019)

Penelitian Pahrizal Nasution (2019) berjudul “*Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Malik)*”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode “*Deskriptif*” dan “*Komparatif*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mana yang lebih relevan pada Pengadilan Agama di Indonesia.

Sesuai dengan penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa, menurut Imam Syafi’i, hakam tidak boleh menjatuhkan talak tanpa kebenaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami dan tidak boleh mengadakan khulu' tanpa kebenaran istri. Manakala menurut Imam Malik, hakam boleh membuat putusan berdasarkan kondisi pasangan suami istri tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁵⁴

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian ini dengan meneliti dan mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan perceraian melalui hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Di samping itu juga, penelitian ini adalah dengan meneliti data yang tertulis yang berkaitan dengan masalah yang sedang di kaji yaitu Hakim . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan putusan hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.⁵⁵

⁵⁴ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Riau: UR Press, 2021), Hal. 27

⁵⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1, h.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berlokasi di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis. Selain itu, di lokasi ini terdapat permasalahan dalam penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di mahkamah Syariah Selangor menurut Pasal 47 dan Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Manakala Objek penelitian ini adalah efektivitas hakam dalam menyelesaikan kasus perceraian di Mahkamah Syariah Selangor.

D. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini, sumber data boleh dikategorikan kepada primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan,⁵⁶ yaitu Pasal 47 Dan Pasal 48, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 mengenai tatacara pelaksanaan perceraian melalui hakam.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu penjelasan enakmen berupa buku-buku pakar undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Fiqh Munakahat, Kaedah Hakam Negeri Selangor, Nailul Authar, Fikih Sunnah, Dan lain-lain.

⁵⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm. 174

Prof. Dr. Almasdi Syahza menjelaskan dalam bukunya, data sekunder adalah peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.⁵⁷

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Malaysia, Ensiklopedia dan lain-lain.

E. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari 4 orang pegawai yang berkhidmat di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) dan 11 orang hakim dari Majelis Agama Islam Selangor (MAIS). Sampel kasus diambil sebanyak 6 kasus tentang perceraian melalui hakim. Penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), studi kepustakaan dan dokumen (*Dokumentation*). Penulis menggunakan metode-metode ini sebagai berikut:

1. Observasi adalah suatu metode pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.
2. Wawancara (*interview*), adalah metode pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) antara responden dan informan. Antara pihak-

⁵⁷ Almasdi Syahza, *Op.Cit.* Hal. 41

pihak yang akan diwawancara adalah Hakim Mahkamah Syariah Selangor dan banyak lagi pihak-pihak yang lain. Kegiatan ini dilakukan secara lisan.

3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵⁸
4. Dokumen (*Dokumentation*) yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada akhir pembahasannya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang dilakukan bersifat induktif.⁵⁹

H. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Media Press, 2021), Hal. 79-80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.
2. Metode Induktif, yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum. Pendekatan induktif dimulai dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Pendekatan Induktif melibatkan pengumpulan dan pentafsiran data-data yang kemudiannya setiap maklumat ini akan berubah kepada kesimpulan.
3. Pendekatan deduktif, merupakan jenis penelitian yang bermula daripada umum kepada spesifik. Penelitian ini merujuk kepada satu penelitian dimana peneliti bermula dengan hukum yang umum dan digunakan dalam kasus-kasus tertentu. Strategi penelitian Deduktif merupakan kaedah penelitian yang kompleks karena peneliti perlu memperoleh kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus, hukum, teorem, peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis pada bab-bab terdahulu tentang efektifitas hakam dalam menyelesaikan masalah perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hakam di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor berupaya untuk mencari tahu faktor terjadinya perselisihan antara pihak-pihak dan harus mencari solusi atas kebijaksanaannya bagi mencapai perdamaian dalam suatu hubungan rumahtangga itu. Setiap hakam mempunyai kebijaksanaannya masing-masing dalam mengendalikan kasus ketika mengadakan majlis tahkim yaitu proses penyelesaian *syiqaq* yang melibatkan pertemuan suami dan isteri dengan hakam-hakamnya bagi tujuan perdamaian atau perceraian.
2. Efektivitas hakam dalam menyelesaikan masalah perceraian di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dapat dilihat lebih kepada perceraian jika dibandingkan dengan perdamaian. Hal ini dapat dilihat melalui kasus-kasus perceraian yang diselesaikan oleh hakam, mayoritasnya adalah berakhir dengan lafaz *talaq*. Perkara ini disebabkan oleh keterlambatan membentuk hakam karena pasangan sudah nekad ingin bercerai, seharusnya hakam dibentuk semasa *syiqaq* baru berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan fungsi hakam dalam menyelesaikan *syiqaq* dalam sesebuah rumahtangga. Menurut mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'I, hakam-hakam hanyalah sebagai wakil bagi mendamaikan pihak-pihak. Maka sebagai wakil, hakam-hakam tidak boleh memisahkan pasangan suami isteri. Namun menurut mazhab Maliki, hakam adalah wakil dan bisa juga membuat keputusan untuk menceraikan pasangan suami isteri yang sedang bertikai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis ingin menyarankan beberapa hal dengan harapan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pasangan suami isteri supaya memahami landasan sebenar dalam berumahtangga. Pasangan suami isteri harus bersedia untuk menghadapi konflik yang terjadi dalam rumahtangga. Jika ada perselisihan yang terjadi, pasangan harus langsung menyelesaikan masalah yang terjadi agar tidak bertambah teruk sehingga bisa kepada tahap perceraian.
2. Kepada para hakam, penulis menyarankan agar dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sesebuah rumahtangga sebagai juru damai perlu ditingkatkan lagi dalam mengendalikan proses perdamaian antara pihak-pihak yang sedang bersengketa supaya lebih efektif sesuai tujuan hakam yaitu mendamaikan pihak-pihak.

3. Kepada Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, penulis menyarankan agar proses perdamaian melalui hakam ini perlu dilakukan apabila *syiqaq* baru terjadi dalam sebuah rumah tangga itu agar tingkat keberhasilan hakam sebagai juru damai tercapai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqah Sunnah Wanita Muslimah Cet 4*, (Selangor: Berlian Publications, 2013)
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Azzam:2005)
- Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munkahat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Terj. Harits Fadly (Surakarta: Era Intermedia, 2005).
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian*, (Riau: UR Press, 2021)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Ahmad Hoyir, *Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perawinan Di Indonesia*, Asy-Syari'ah, Vol. 16 No. 2, Agustus 2014
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke 1
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih) Cet 1*, (Palembang: CV.Amanah, 2019),
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10200-055-0072-2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10021-055-0405-2021
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10019-055-0191-2021
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10021-055-0041-2021
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10019-055-0231-2021
- Dokumen Mahkamah Rendah Syariah Di Shah Alam, Selangor, Kes No. 10002-055-0365-2021
- Fauzan Nento, Titin Samsudin, *Perkara Syiqaq Perspektif Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo*, Al-Mizan, Vol. 14, No.2, 2018
- Hj. Wati Rahmi Ria, Sh. Mh., *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2018)
- Hazwani Binti Abdul Rahim, Pembantu Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Selangor, *Wawancara*, 20 Oktober 2022
- Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Bulughul Maram Cet 2*, (Qaherah, Mesir : Darul Uthman Littarath, 2013)
- Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar jilid 3*, Terj. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz (Pustaka Azzam, 2011)
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Idham Kholid, *Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah*, Ejournal Inklusif, Edisi 1 Vol. 1, 2016
- Jabatan Kehakiman Syariah Selangor “*Pengenalan Mengenai Hakam*”
<https://www.jakess.gov.my/index.php/ms/perkhidmatan/perkhidmatan-utama/hakam>
- Muhamad al-Fattah, *Peran Hakam Dalam Mengatasi Perceraian*, El-Usrah, Vol. 1 Nom. 1, Juni 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mohd Nurul Azhar Bin Tohar dkk, *Jakess Dua Dekad Penubuhan* (Selangor: Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, 2011)
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian Ed. 1 Cet. 2.*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Nur Zulfah, Mazarina Nasuha, *Penglibatan Jawatankuasa Pendamai dan Hakam Dalam Penyelesaian Tuntutan Perceraian*, UITM Press, November 2021
- Nurfattah Bin Ahmed, Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Selangor, *Wawancara*, 26 September 2022
- Pakdi, “Penjelasan Artikel 121(1A) Perlembagaan Persekutuan” <https://www.malaysiakini.com/letters/45948>
- Pasal 47 & Pasal 48, Perceraian dengan talak atau dengan perintah & Timbangtara Oleh Hakam, Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Selangor
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Yogyakarta: Cakrawala Publishing , 2008)
- Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta :Pustaka As-Sunnah, 2009)
- Sekretariat Akhbar Kerajaan Negeri Selangor “*Sejarah Negeri Selangor*” (Selangor.gov.my/index.php/pages/view/124)
- Siti Muhaini Binti Abdullah Hamami, Pembantu Penolong Pendaftar Mahkamah Rendah Syariah Selangor, *Wawanara*, 20 Oktober 2022
- Sunan Abi Dawud 2175, Divorce (Kitab Al-Talaq), <https://sunnah.com/abudawud:2175>
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Tuan Fairus Bin Jaafar, Ketua Bahagian Penyelesaian Alternatif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, *Wawancara*, 19 Julai 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangorsa
- Tuan Muhammad Ammar Yaser Bin Ahmad Nazri, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 6 Oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Dr. Zulkefli bin Hj. Aini, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 6 Oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Syed Walid Al Giffa Bin Syed Ibrahim, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 23 September 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Hj Mohamad Tawadz'o Bin Abbas, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 22 September 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Mohd Ramizi Bin Haji Remli, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 22 September 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Mohamad Rais Bin Rasid, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 23 September 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Ahmad Baei Bin Jaafar, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 5 oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Dr. Shadli Bin Sabarudin, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 5 oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Farzad Abdul Jalil, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 20 oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor
- Tuan Muhammad Firdaus Bin Azman, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 20 oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuan Mohd Firdaus Bin Akhtar, Hakam Panel Majlis Agama Islam Selangor, *Wawancara*, 20 oktober 2022, di kantor Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wikipedia, “Mahkamah Syariah Di Malaysia”
https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia

Warta Kerajaan, *Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) 2014*, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, Jil. 67 No. 10, Mei 2014

Wikipedia, “Tun Sri Lanang”
https://ms.wikipedia.org/wiki/Tun_Sri_Lanang

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Media Press, 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hakam Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian Di Bawah Pasal 47 Dan Pasal 48 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (Studi Kasus Jabatan Kehakiman Syariah Selangor)** yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Akashah Bin Ahmad Aznan

NIM : 11820115294

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin/ 5 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

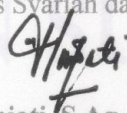
Penguji III
Dr. Hendri. K., M.Si

Penguji IV
Drs. Arifuddin, MA

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003